

DOI: <https://doi.org/10.31289/publika.v11i1.9535>



Jurnal Ilmu Administrasi Publik

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma>

**Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agribisnis Kakao
Di Kabupaten Berau Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Berau**

Slamet Riadi^{*)}, Lisman Manurung²⁾, Darmanto³⁾

^{1,2,3)} Program Pascasarjana Universitas Terbuka Samarinda, Indonesia

Disetujui: Mei 2023; Direview: Mei 2023 ; Diterima: Juni 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengembangan kawasan agribisnis kakao di Kabupaten Berau Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan analisis deskriptif dari hasil transkrip wawancara kemudian di narasikan dalam sebuah kalimat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan kawasan agribisnis kakao di Kabupaten Berau Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Berau sangat efektif dan efisien karena selain empat dimensi implementasi kebijakan telah berjalan sebagaimana mestinya, peneliti menemukan adanya novelty yaitu adanya leadership yang kuat serta kemampuan manajerial dari kepala dinas perkebunan dalam mengkolaborasi sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu factor pendukung dalam implementasi kebijakan ini adalah dukungan Pemerintah Kabupaten Berau adalah komitmen dari Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Berau menjadikan komoditi Kakao menjadi unggulan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Berau dan ditindaklanjuti dengan kebijakan turunannya sampai dengan alokasi pendanaan kegiatan. Adapun factor penghambat dari Implementasi ini adalah dipengaruhi kondisi alam karena kelembaban yang tinggi, alih fungsi lahan dengan komoditas lainnya, dan kurangnya kapasitas petani terkait manajemen kakao serta dampak pandemi covid19 pada awal 2020 sampai hari ini.

Kata Kunci: Kebijakan, Kakao, Kawasan, Pengembangan

Abstract

This study aims to examine the implementation of cocoa agribusiness area development policies in Berau District at the Berau District Plantation Office. This research method is qualitative research. Data collection techniques were carried out using interviews, literature studies, documentation and observation. Data analysis techniques were carried out using descriptive analysis stages from the results of the interview transcripts and then narrated in a sentence. The results of this study indicate that the policy for developing cocoa agribusiness areas in Berau District at the Berau District Plantation Service is very effective and efficient because in addition to the four dimensions of policy implementation that have been running as they should, researchers found novelty, namely the presence of strong leadership and managerial abilities from the head of the plantation service in Collaborate existing resources to achieve organizational goals. One of the supporting factors in the implementation of this policy is the support from the Government of Berau Regency, namely the commitment of the Regional Head, in this case the Regent of Berau, to make Cocoa a commodity to be featured in the Berau Regency RPJMD document and follow up with its derivative policies up to the allocation of activity funding. The inhibiting factors for this implementation are influenced by natural conditions due to high humidity, land conversion with other commodities, and the lack of farmer capacity related to cocoa management and the impact of the covid19 pandemic in early 2020 until today.

Keywords: Policy, Cocoa, Region, Development

How to Cite: Riadi, S, Manurung, L. & Darmanto. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agribisnis Kakao Di Kabupaten Berau Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, Vol.11 (1): 68-80

*Corresponding author:

E-mail: slametriadi21@gmail.com

ISSN 2549-1660 (Print)

ISSN 2580-2011 (Online)

PENDAHULUAN

Pembangunan yang sistematis dengan prioritas-prioritas yang terukur, sangat membantu percepatan pembangunan dan kemajuan daerah. Selanjutnya kerjasama seluruh aparatur pemerintahan dan pihak terkait sangat diperlukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Perkembangan perekonomian masyarakat selain bertumpu pada potensi sumberdaya alam yang dimiliki, sumberdaya manusia (SDM), kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi, juga ditentukan sejauh mana rancangan pembangunan yang dibuat oleh pihak pemerintah kabupaten agar segenap potensi yang ada dapat diberdayakan secara optimal (Adeniya, O. R., & Ogunsola, G. O. (2014).

Salah satu arah kebijakan pembangunan Kabupaten Berau ditujukan untuk mengoptimalkan potensi-potensi kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pertanian potensial. Kebijakan ini mempunyai dasar yang kuat, karena seiring dengan terus berkurangnya ketersediaan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti sumberdaya hutan dan sumberdaya tambang yang pada saat ini terus dieksploitasi (Agustino, 2020).

Salah satu sektor yang perlu dikembangkan sebagai industri berbasis potensi sumberdaya alam Kabupaten Berau adalah sektor pertanian. Oleh karena itu sektor pertanian ditetapkan menjadi sektor prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau tahun 2016-2021 sehingga perlu adanya percepatan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas. Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dalam arti luas, tentunya permasalahan yang dihadapi juga sangat kompleks. Saat ini di Kabupaten Berau kebutuhan akan pemanfaatan lahan sangat kompetitif hal ini bisa dilihat banyaknya lahan pertanian potensial dan subur yang telah beralih fungsi dan juga ekspansi pertambahan batubara.

Bidang perkebunan merupakan salah satu subsektor strategis yang secara ekonomis, ekologis, dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, secara

ekonomi subsektor perkebunan berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta memperkuat struktur ekonomi wilayah dan nasional. Sedangkan secara ekologi, subsektor perkebunan berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen, serta penyangga kawasan lindung (Aryal, et.al. (2020).. Dalam kerangka sosial budaya, subsektor perkebunan berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi sektor pertanian cukup besar.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program subsektor perkebunan serta agar mampu eksis dan unggul dalam perubahan ekonomi global, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Berau sebagai suatu organisasi pemerintahan terus melaksanakan perubahan secara kontinyu menuju arah perbaikan positif dengan berbagai program kegiatan yang solutif. Antisipasi terhadap setiap permasalahan yang akan dihadapi serta perubahan era globalisasi tersebut disusun dalam suatu tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Sub sektor perkebunan merupakan sub sektor pendukung utama yang berperan penting bagi perekonomian nasional antara lain : 1. Sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat/petani kakao, 2. Sumber bahan baku industri, 3. Sumber kebutuhan pokok serta penyumbang devisa bagi Negara dalam Siti Yuliaty Chansa Arfah (Jinap, S., Hasnol, N. D. S., Sanny, M., & Jahurul, M. H. A. 2018).

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menaungi segala macam program pengelolaan subsektor perkebunan dari hulu ke hilir. Sebagai organisasi yang memiliki manajemen dengan orientasi pada hasil dan capaian, maka memerlukan sebuah perencanaan yang taktis dan aplikatif dilaksanakan di lapangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau telah

memberikan kontribusi cukup besar dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Berau selama ini. Walaupun masih dijumpai berbagai kelemahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan terus berbenah diri dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan pembangunan yang kian kompleks.

Searah dengan dengan salah satu misi pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021 yakni “Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dengan Memanfaatkan Sumber Daya Alam, Termasuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata dan Kearifan Lokal “. Untuk menjabarkan misi tersebut, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dalam Rencana Strategis (Renstra) membuat langkah strategi mengembangkan 5 (lima) komoditas unggulan anatar lain : Sawit, Kakao, Lada, Karet dan Kelapa Dalam (Iksan, Djefry dan Nasrun, 2018). Adapun ikuran kinerja utama (IKU) Dinas Perkebunan adalah produksi perkebunan yang tinggi dan berkualitas sesuai standar teknis.

Sementara itu bagi Indonesia, komoditas kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang perlu mendapatkan perhatian serius karena peranannya cukup penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia mulai dari tingkat masyarakat, UMKM sampai perindustrian. Komoditas perkebunan Indonesia yang cukup potensial adalah kakao dalam Siti Yuliaty (Chansa Arfah, 2919 dalam Utomo, Prawoto, Bonnet, Bangwiwat, & Gheewala, 2016). Kakao merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional (Saleh, 2016). Peranan tersebut terutama sebagai penyedia lapangan kerja dan sebagai sumber devisa negara terbesar ketiga dari sub sektor perkebunan setelah karet dan minyak sawit (Koissy, et.al, 2020).

Seiring dengan kondisi di atas bahwa komoditi kakao juga merupakan salah satu komoditi unggulan sub sector perkebunan (Denkyirah, E. K., Okoffo, E. D., Adu, D. T., & Bosompem, O. A., 2017). Luasan area perkebunan kakao tersebut tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Berau

antara lain : Kecamatan Teluk Bayur, Sambaliung, Kelay, Gunung Tabur, Segah, Tabalar, Biatan, Talisayan dan Batu Putih.

Kakao merupakan salah satu komoditi unggulan karena beberapa faktor (Saputro, dan Yuli. 2020): antara lain mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi baik di pasar domestic dan Manca Negara (Kohls dan Uhl, 2002). Luas area perkebunan kakao di Kabupaten Berau pada tahun 2020 tercatat seluas 1.253.5 Ha, dengan jumlah petani sebanyak 1,312 orang. Adapun produksi komoditi kakao selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana table berikut :

No	Tahun	Luas Area Komoditi	Produksi (Kg)	Produktivitas (Kg/Ha/Th)
1	2	3	4	5
1	2016	2.159.50	1.074.367	624,80
2	2017	2,090.55	602.298	369,84
3	2018	1,677.55	661.140	394,11
4	2019	1,625.05	680.352	610,98
5	2020	1.253,05	787.660	894,51
6	2021	984,30	513.634	835,45
7	2022	1.003,80	600.871	949,54*)

Dari tabel diatas dapat diinformasikan bahwa pada tahun 2016 terjadi angka produksi yang cukup tinggi tapi produktivitas rendah karena luasan tanam yang cukup luas yaitu 1.719,5 Ha dan dari bibit pilihan, namun pada tahun tahun berikutnya 2017 dan 2018 mengalami penurunan karena luas panen yang berkurang salah satunya akibat alih fungsi lahan, sementara pada tahun 2019, 2020 terjadi lonjakan produktivitas dengan luas panen 1.625,05 Ha karena diterapkan teknologi tepat guna yaitu sambung samping, sambung pucuk entres (kegiatan rehabilitasi perkebunan) dan menjadikan produksi dan produktivitas yang tinggi meski luas panen lebih rendah dari pada tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2021 dan 2022 terjadi perubahan drastis khususnya luas tanam dari akibat adanya alih fungsi lahan dengan komoditi lainnya (Sinaga, & Kusumaningrum, 2020).

Dalam pelaksanaan pengembangan sektor perkebunan, yang harus menjadi pedoman adalah bagaimana seluruh stakeholder termasuk leading sector Dinas Perkebunan sampai lapisan masyarakat petani kakao diberdayakan dan diajak untuk ikut

berpartisipasi dalam pengembangan agribisnis kakao di Kabupaten Berau ditengah fluktuasi APBD II yang cukup labil dan kebijakan re-focusing APBD II karena dampak pandemic covid19 mulai di awal tahun 2020.

Turut berpartisipasinya lapisan masyarakat dalam hal ini kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) harus diwujudkan yang bertujuan salah satunya untuk meratakan keuntungan ekonomi dari pengembangan sektor pertanian sub sektor perkebunan (Hesti, 2016). Dengan mekanisme tersebut, diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian daerah, namun juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara merata sehingga dapat tercipta kesejahteraan yang berkeadilan.

Untuk mendorong percepatan terwujudnya program tersebut diatas seiring dengan adanya Kebijakan Kepala Daerah, Surat Keputusan (SK) Bupati Berau Nomor 530 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Kawasan Pengembangan Agribisnis Kakao di Kabupaten Berau serta adanya Memorandum of Understanding (MoU) Tahun 2018 antara Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Pemkab Berau dan PT. Berau Coal Tentang Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) bidang komoditi kakao, serta adanya pihak terkait yang konsern dalam pengembangan komoditi kakao antara lain: masyarakat, sector swasta dan NGO, maka penulis bermaksud akan melaksanakan penelitian lebih lanjut dan mengetahui lebih detail, terkait pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kakao di Kabupaten Berau pada SKPD Dinas Perkebunan dengan Judul, Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agribisnis Kakao di Kabupaten Berau pada Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu proses yang meliputi eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok atau lembaga, dan menggambarkan masalah sosial atau masalah (Sugiyono, 2017). mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif,

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan obsevasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksikan fenomena, dan menentukan hipotesis.

Dalam penelitian ini, pemilihan narasumber atau informan dilakukan secara *purposive-sampling*. Cara ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa narasumber yang dipilih adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui atau terlibat langsung dengan focus penelitian yang akan dilakukan selama penelitian. Secara spesifik informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau (key Informan)
2. Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Berau
3. Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau
4. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kabupaten Berau
5. Kelompok Tani Kakao (masyarakat)
6. Gapoktan Kakao (masyarakat)
7. Kepala UPTD Perkebunan
8. Forum Perkebunan Berkelanjutan Kabupaen Berau

Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi (informan), peneliti sebagai instrument utama penelitian memerlukan instrument yaitu pedoman wawancara. Peneliti juga menggunakan studi pustaka untuk memperoleh bahan-bahan tertulis atau dalam bentuk lainnya yang relevansinya dengan focus penelitian, sebagaimana yang dinyatakan Irawan dalam (Suparman, 2017), bahwa "Metode kepustakaan adalah penelitian yang didalamnya diambil terutama atau seluruhnya dari kepustakaan (buku, dokumen, artikel, jurnal, laporan, koran dan lain-lain sebagainya)". Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji dokumen-dokumen tentang peranan lembaga dalam pengembangan kakao di Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau.

Metode Analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif. Menurut (Arikunto, 2006), metode analisis deskriptif merupakan penelitian bukan eksperimen, karena tidak dimaksudkan untuk mengetahui akibat dari suatu perlakuan. Dengan penelitian deskriptif peneliti hanya bermaksud menggambarkan (mendeskripsikan) atau menerangkan gejala yang sedang terjadi.

Data yang didapat dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian atau ditempat lain, tidak dalam bentuk angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan memperbanyak informasi, mencari hubungan ke berbagai sumber terkait kemudian membandingkan, dan menemukan hasil atas dasar data sebenarnya (tidak dalam bentuk angka). Hasil analisis data tersebut berupa pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang sedang diteliti dan disajikan dalam bentuk uraian narasi tulisan. Pemaparan data tersebut biasanya adalah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah yang sudah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Metode analisis data dalam penelitian ini mangacu pada proses yang disarankan (Irawan, 2012), yaitu : pengumpulan data mentah melalui wawancara terhadap key informan, pembuatan transkrip data yaitu proses pemindahan data yang diperoleh dalam bentuk rekaman atau tulisan tangan menjadi catatan dalam bentuk tertulis dan terstruktur, pembuatan koding yaitu proses pemilihan dan pemusatan data yang telah ditranskrip dipilah pada bagian-bagian tertentu untuk menemukan hal-hal yang penting perlu dicatat sebagai kata kunci dan nantinya diberi kode, membuat kategorisasi data.

Pada tahap ini data yang telah diberi kode sebelumnya dikelompokkan menurut jenisnya dan disederhanakan dengan cara mengikat konsep-konsep (kata kunci) dalam satu besaran yang disebut dengan istilah kategori, membuat kesimpulan sementara. Pada proses ini dari kategori data yang sudah dibuat ditarik kesimpulan sementara sehingga data yang diperoleh memiliki makna. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa

tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yang dibuat kesimpulan akhir merupakan reduksi dari hasil triangulasi dalam kata-kata yang lebih general dan sederhana serta bermakna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Komunikasi

Menurut Kepala Dinas Perkebunan diawali dengan membentuk tim kelompok kerja (Tim Pokja) untuk menyamakan persepsi dan melaksanakan kebijakan sosialisasi ke beberapa pihak terkait termasuk masyarakat petani, kelompok tani kakao di Kabupaten Berau. SK Tim Pokja juga merupakan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 571 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Gerakan Mengembangkan Agribisnis Kakao yang disingkat GEMARI KAKAO.

Agar pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut berjalan sebagaimana mestinya maka diperlukan membangun koordinasi dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baplitbang) agar pengembangan kakao bisa difasilitasi oleh program kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Dari hasil wawancara dengan kepala dinas dan kepala-kepala bidang di dinas perkebunan didapatkan data program kegiatan yang mendukung implementasi kebijakan tersebut sebagai berikut :

“Kegiatan Gemari Kakao mulai dicanangkan oleh Bupati Berau pada 27 Nopember 2017 dan pada tahun 2018 kegiatan Gemari Kakao ini mulai direalisasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018 dengan rincian kegiatannya meliputi Koordinasi Tim Kelompok Kerja dan penyusunan Rencana Aksi”.

Gerakan Pengembangan Agribisnis Kakao (GEMARI KAKAO) melalui pembentukan Tim Pokja GEMARI KAKAO yang terdiri dari unsur pemerintah dan Stakeholders dengan Keputusan Bupati. Peran dan fungsi Tim Pokja Gemari Kakao adalah sebagai wadah untuk mengkoordinasikan dan menghantarkan terwujudnya tujuan Gemari Kakao.

Menurut Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, Ir. Sumaryono, "Perkembangan Produksi Komoditi Kakao di Kabupaten Berau terus mengalami peningkatan seiring dengan adanya kerjasama untuk Kembali meningkatkan minat masyarakat petani pekebun kakao Kabupaten Berau melalui Kegiatan Gemari Kakao yang dimulai pada tahun 2017."

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau bersinergi dengan Dinas terkait seperti Dinas Pangan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta Baplitbang Kabupaten Berau, telah memfasilitasi terjalannya kerjasama masyarakat pekebun kakao dengan PT. Berau Coal melalui Pabrik Berau Cocoa dalam usaha penjaminan pembelian biji kakao petani/pekebun Kabupaten Berau dengan cara pembelian biji kakao basah langsung dari petani, yang selanjutnya difermentasi sendiri oleh PT. Berau Coal di Pabrik Berau Cocoa untuk mendapatkan keseragaman kualitas biji

kakao kering yang dihasilkan dan layak jual sesuai spesifikasi yang diinginkan pembeli (Halaliah, dkk, (2019).

Menurut Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, Ir. Amran Arief, "Dengan adanya kerjasama tersebut, selain meningkatkan kembali minat petani pekebun kakao, rantai pembelian tengkulak yang merugikan petani kakao yang terjadi selama ini juga dapat ditekan dan kualitas kakao Berau fermentasi yang produknya dapat lebih baik dan seragam dengan kriteria kualitas yang telah ditentukan."

Semangat Gemari Kakao telah dapat dilihat hasilnya dalam kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2020 dengan mulai adanya peningkatan produksi biji kakao. Adapun peningkatannya dapat diketahui berdasarkan data Statistik sesuai table dibawah ini:

Tabel 1
Perkembangan Produksi Kakao Tahun 2017 -2021

Tahun	Luas (Ha)				Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	Tenaga Kerja
	TBM	TM	TR	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8
2017	239,5	1628,60	222,5	2090,60	602,29	370	1682
2018	254	1118,10	306	1677,60	661,14	591	1329
2019	231	1113,6	280,5	1625,05	680,35	611	1312
2020	231	880,6	157,5	1253,05	787,66	1423	1041
2021	301	614,8	68,5	984,3	513,63	835,45	871

Sumber: Statistik Dinas Perkebunan Kabupaten Berau 2017 -2021

Pada Komoditi Kakao, terjadi Penurunan Produksi sebesar 34,8% dari Produksi Kakao tahun 2020 yang sebesar 787 Ton, pada tahun 2021 hanya sebesar 513 Ton. Hal ini disebabkan pada awal bulan Mei 2021 yang seharusnya merupakan salah satu fase panen puncak Kakao, disaat bersamaan terjadi bencana alam yakni banjir bandang di Kabupaten Berau yang menimpa Kecamatan Sambaliung, Teluk Bayur, Kelay dan Gunung Tabur terutama menimpa Kampung-Kampung disepanjang aliran sungai Kelay yang

merupakan sentra pengembangan budidaya Kakao di Kabupaten Berau.

Dimensi Disposisi

Pelaksanaan kebijakan di masing-masing bidang pada dinas perkebunan Kabupaten Berau untuk mencapai sasaran yang diinginkan menjadi bagian ruang lingkup dimensi disposisi dalam implementasi, termasuk dalam penanganan permasalahan kakao. Menurut Kepala Bidang Perlindungan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, Ir. Heri

Suparno, M.Si, "Dengan adanya bencana banjir tersebut menyebabkan rata-rata petani Kakao di wilayah tersebut mengalami gagal panen. Selain itu akibat dari pasca banjir, dikhawatirkan adanya serangan OPT atau serangan hama Kakao terutama serangan jamur *Phytophthora palmivora*. yang menyebabkan busuk buah Kakao turut menyebabkan penurunan produksi Kakao di tahun 2021".

Ancaman lain implementasi kebijakan ini masifnya alih fungsi lahan menurut Ketua Forum Perkebunan Berkelanjutan (FPB-KB) Ir. H Haris Sabran," *Ancaman yang dihadapi adalah dengan adanya komoditi sawit hari ini yang menjadi primadona di kalangan petani. Hal tersebut terjadi karena faktor jaringan pasar yang jelas sehingga petani sangat mudah teralihkan. Sudah menjadi rumus alam, bahwa kepastian pasar dan harga komoditi menjadi pertimbangan utama bagi petani untuk menentukan komoditi perkebunan yang akan di budidayakan*"

Terkait alih fungsi lahan sebagaimana diungkapkan Ir. Sumaryono Kepala Dinas Perkebunan sebagai berikut,"*Salah satunya terkait dengan kepemilikan lahan dilapangan ternyata adanya alih fungsi lahan, jadi setelah program gemari kakao diluncurkan sementara lahan sudah berkurang, kemudian adanya tingkat koordinasi multi pihak yang berkepentingan ternyata juga tidak mudah untuk mengumpulkan untuk berkomunikasi, itu kita sikapi bahwa OPD Disbun harus bisa memanfaatkan kondisi yang ada yaitu salah satunya memanfaatkan IT*"

Dalam upaya menindaklanjuti permasalahan tersebut, langkah-langkah yang telah dilakukan Dinas Perkebunan antara lain :

- a. Melaksanakan pelatihan kepada petani/pekebun dengan metode Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT).
- b. Memberikan bantuan sarana pupuk organik dan pengendalian OPT berupa obat-obatan yang ramah lingkungan, terutama di wilayah terdampak banjir di tahun 2021.
- c. Pemberian bantuan bibit kakao bersertifikat untuk perluasan dan peremajaan, Penguatan Intensifikasi dengan stimulant pemberian bantuan pupuk dan obat-obatan, serta ditunjang

dengan penyampaian teknologi sambung pucuk pada tanaman rusak atau tua yang masih memiliki kemampuan produktifitas yang baik.

- d. Mendorong dan memotivasi petani/pekebun untuk tetap mengembangkan komoditi kakao dengan semangat Program Gerakan Mengembangkan Agribisnis Kakao (GEMARI KAKAO), dengan cara mengidentifikasi permasalahan / kendala yang dihadapi pekebun kakao dalam mengembangkan budidaya kakaonya dan bekerjasama dengan OPD terkait dan mitra Pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau serta Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kakao Berau untuk bersama-sama mencari solusi pemecahan permasalahan yang dihadapi pekebun Kakao di Kabupaten Berau.
- e. Menyebarluaskan informasi produksi dan harga pasar komoditas perkebunan ke tingkat kampung dan kecamatan sebagai stimulant yang dapat meningkatkan semangat petani pekebun dalam usaha budidaya komoditi perkebunan.
- f. Melakukan Sosialisasi Fasilitas Akses Permodalan dengan berkerja sama dengan bank Kaltimara dan BRI untuk menunjang Kegiatan Pengembangan Modal Usaha Perkebunan.

Menurut Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, Ir. Heru Wibowo "Pendampingan untuk pengolahan pasca panen Kakao bagi masyarakat dilakukan mulai tahun 2020, Dinas Perkebunan bekerjasama dengan Mitra Pembangunan Solidaridad Indonesia, telah memfasilitasi PKK Kampung Tumbit Melayu sebagai pelaku usaha industry hilir (UMKM) untuk pembuatan Cookies dengan merk dagang CoKukies, merupakan makanan ringan dengan bahan dasar dari Kakao Kampung Tumbit Melayu sebagai oleh-oleh khas Berau. Bahan baku Coklat CoKukies diambil dari Kakao yang dikelola oleh masyarakat pekebun kakao di Kampung Tumbit Melayu dan diolah untuk dijadikan bubuk Coklat di UPT. Balai Benih dan Pasca Panen Tanaman Perkebunan, Dinas

Perkebunan Kabupaten Berau di Tumbit Melayu.

Selain itu, PT. Berau Coal melalui Pabrik Berau Cocoa, di tahun 2020 telah melakukan penjualan biji kakao Berau Fermentasi untuk diekspor ke pangsa pasar dunia yaitu ke Taiwan, Italia, Australia dan Philipina, dan untuk tahun 2021 Pabrik Berau Cocoa telah menerima pemesanan biji kakao Berau fermentasi ke Jepang. Untuk pasar domestik Pabrik Berau Cocoa telah melakukan penjualan biji kakao berau fermentasi ke Bali, Jember (Jawa Timur), Makasar (Sulawesi Selatan), dan Bogor (Jawa Barat).

Harga Biji Kakao Kering Fermentasi di Tahun 2021 rata-rata adalah sebesar Rp. 24.500,- per kilogram nya, sedangkan harga biji kakao basah yang dibeli oleh Pabrik Berau Cocoa rata-rata adalah sebesar Rp. 8.300,- per kilogram. Untuk Kualitas Biji Kakao Kering Fermentasi SNI Kualitas AA, Pabrik Berau Cocoa telah membeli dari petani dengan harga Rp. 35.000,- per kilogramnya, diketahui harga tersebut lebih tinggi dari harga yang diberikan oleh Puslitkoka Jember pada kualitas yang sama, yaitu hanya seharga Rp. 33.000,- per kilogram. Sedangkan untuk pembelian biji kakao basah dengan kualitas AA, Pabrik Berau Cocoa memberikan harga Rp. 10.000,- per kilogramnya.

Harapan sebagaimana disampaikan Kelompok Tani Kakao/ICS, *"Dengan adanya peluang pasar yang menjanjikan dengan adanya jaminan pasar dari Pabrik Berau Cocoa bagi petani Kakao Kabupaten Berau tersebut, diharapkan dapat lebih meningkatkan jangkauan wilayah atau kampung yang akan bekerjasama dengan Pabrik Berau Cocoa"*, serta minat masyarakat dalam menjaga kebun kakao untuk tetap berkelanjutan.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Perkebunan sebagai berikut, *"Dari sisi komoditas sendiri sangat diperlukan oleh dunia Internasional dan tidak semua negara bisa menghasilkan kakao untuk permintaan yang ada saat ini kita blm ampu memenuhinya nya, peluang pasar cukup menjanjikan dari sisi harga ikuti time series harga prosudksi kakao tidak pernah fluktuasinya itu rusak, paling seslisihnya debelakang koma dan relatif stabil. Kedepannya karena ini urusan multi pihak antara lain dinas*

pertanahan, perijinan dan pihak-pihak terkait lainnya, kedepan tergantung bagaimana terkait drivernya? Harus bisa membawa "kendaraan" dengan baik"

Kendala saat ini Pabrik Berau Cocoa baru menerima pembelian untuk biji kakao basah dari petani pekebun di 18 (delapan belas) Kampung yang tersebar di wilayah Kecamatan Gunung Tabur, Teluk Bayur, Segah, Sambaliung dan Kelay. Target Dinas Perkebunan selanjutnya adalah menambah jumlah Kampung binaan dan menambah luasan tanaman untuk bekerjasama dengan Pabrik Berau Cocoa seiring dengan usaha pembinaan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas biji kakao petani sesuai standar yang ditentukan buyer.

Dimensi Birokrasi

Dimensi ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan karena ada bagian-bagian khusus untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut kepala dinas perkebunan bahwa modal utama dalam pengembangan kakao di Kabupaten Berau adalah karena adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Berau yang menjadikan komoditi kakao menjadi produk unggulan pada dokumen RPJMD, sehingga APBD dapat membiayai keperluan dalam kepentingan tersebut dalam bentuk program dan kegiatan.

Dukungan program kegiatan dari sumber dana APBD sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Perkebunan Ir. Heru Wibowo sebagai berikut, *"Sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 ada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petani dan Kemampuan Lembaga Petani dan Program Penyuluhan Pertanian. Bentuk kegiatan tersebut antara lain : Pelatihan Budidaya Kakao dan Hama Penyakit dan Pelatihan Dinamika Kelompok dalam Pengembangan Kakao,"*

Menurut Kepala Bidang Perlindungan Ir. H Heri Suparno, M.Si, *"Dinas Perkebunan memiliki program dan kegiatan yang mendukung pengembangan kawasan agribisnis kakao di Kabupaten Berau sejak Tahun 2002 hingga sekarang yaitu Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu dimana kegiatan*

ini lebih fokus dalam upaya pengendalian hama dan penyakit pada tanaman. Melalui SLPHT diharapkan dapat membantu para petani/pekebun kakao dalam mengelola kebunnya sehingga dapat meningkatkan hasil produksinya,” .

Menurut Kepala Perkebunan Ir. Sumaryono, *“Dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi kakao di Kabupaten Berau, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah memfasilitasi pembentukan Masyarakat Perlindungan Identifikasi Geografis (MPIG) Kakao Kabupaten Berau. Dengan terbentuknya MPIG Kakao Berau ini, diharapkan nantinya produksi kakao Berau dapat disertifikasi IG yang akan sangat berpengaruh terhadap daya saing dan jaminan pasar dalam meningkatkan pemasaran baik domestic maupun ekspor”*.

Menurut Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, *“Pada Tanggal 9 sampai dengan 10 September 2021, Tim Kemenkum HAM RI, telah melaksanakan Penilaian Kelayakan Pengajuan Permohonan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) Kakao Berau, dan Pada Tanggal 9 Februari 2022, Sertifikat IG Kakao Berau disampaikan langsung oleh Tim Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Ibu Bupati Berau. Dengan demikian, Kabupaten Berau merupakan Kabupaten Pertama di Indonesia yang menerima Sertifikat IG pada komoditi Kakao”*

Hal senada juga disampaikan oleh ketua Forum Perkebunan Berkelanjutan Kabupaten Berau (FPB-KB) Ir. H Haris Sabran, *“Adanya sertifikasi IG ini, selain memberikan perlindungan hukum terhadap produk lokal, jaminan keaslian suatu produk dan peningkatan penerimaan produsen, pemerintah dan petani kakao dituntut untuk mempertahankan kekhasan dari produknya untuk itu masyarakat dituntut untuk memiliki sistem kontrol kualitas yang konsisten dari instansi pembina agar produk yang diterima sesuai dengan label IG yang dimiliki’*.

Menurutnya juga, *“Dengan sertifikasi IG ini maka pemerintah telah memiliki skema kontrol yang jelas terhadap komoditi kakao di Kabupaten Berau, mulai dari tahapan pemilihan benih, sarana produksi, penanganan dan pengelolaan pasca panen, harus sesuai dengan apa yang dituangkan dalam dokumen*

IG yang diajukan, bahkan sampai pada pemasaran hasil produk yang dimiliki petani, salah satunya Berau Cocoa yang menjadi bagian hilirisasi produk yang tak terpisahkan dalam mendukung pengembangan kakao di Kabupaten Berau”.

Sementara sebagaimana laporan Tim Pokja Gemari Kakao, *“Tim Kelompok Kerja Gerakan Mengembangkan Agribisnis Kakao pada Tahun 2018 melaksanakan rapat koordinasi sebanyak 3 (tiga) kali. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia, namun melalui kelompok-kelompok kecil Tim ini beberapa kali pertemuan dalam rangka mensupport untuk memberi kontribusi data pada pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pokja Gemari.*

Agenda rapat koordinasi beberapa tahap yaitu Tahap awal adalah mensosialisasikan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 571 Tahun 2017 kepada Tim Pokja dan sinkronisasi data – data wilayah /kampung yang akan di tunjuk sebagai kawasan pengembangan agribisnis kakao, sebagai tindak lanjut MOU Pemerintah Kabupaten Berau dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, PT. Berau Coal Energy Tbk.

Kegiatan Rapat Tim Pokja Gemari Kakao yaitu sosialisasi dan sinkronisasi data wilayah/kampung yang akan di tunjuk sebagai kawasan mengembangkan agribisnis kakao yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Berau. Berdasarkan hasil rapat maka untuk data penunjukkan kawasan, disepakati bahwa data yang dianalisis dengan 2 kriteria :

- Kawasan existing adalah kawasan yang sudah ada aktifitas kegiatan agribisnis kakao.
- Kawasan potensi pengembangan adalah kawasan yang berpotensi untuk pengembangan agribisnis kakao.

Untuk tindak lanjut penunjukkan kawasan, Tim Kecil yang di koordinir oleh Dinas Perkebunan akan mengkoordinasikan dengan Bapelitbang, Dinas Pertanahan, PT. Berau Coal Energy, Tbk yang juga selaku anggota Tim Pokja. Hasil koordinasi beberapa kali pertemuan, pertama diperoleh data luasan kawasan yang akan di tunjuk terdiri dari

kawasan existing seluas 2.428 ha, Kecamatan Teluk Bayur dalam wilayah Kampung Labanan Makarti, Tumbit Melayu, Kecamatan Sambaliung dalam wilayah kampung Tumbit Dayak, Long Lanuk, Suaran. Kecamatan Kelay dalam wilayah kampung Merasa. Kecamatan Segah dalam wilayah kampung Batu Rajang, Tepian Buah, Punan Malinau. Kecamatan Gunung Tabur dalam wilayah kelurahan Gunung Tabur, Kampung Maluang. Kedua, kawasan potensi pengembangan seluas 7.050 ha, Kecamatan Teluk Bayur dalam wilayah kampung Labanan Makarti, Tumbit Melayu. Kecamatan Sambaliung dalam wilayah kampung Tumbit Dayak, Bena Baru, Gurimbang, Pijanau, Sukan Tengah, Tanjung Perangat. Kecamatan Segah dalam wilayah kampung Long Ayah Kecamatan Gunung Tabur dalam wilayah kampung Maluang, Gunung Tabur, Birang, Samburakat, Tasuk.

Berdasarkan data-data tersebut diatas dengan pertimbangan beberapa aspek rujukan legalitas dan aspek animo masyarakat yang masih mengembangkan kakao, serta daya dukung teknis sumber daya lahan serta potensi sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan agribisnis kakao, maka di usulkan dan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 530 Tahun 2018 tentang Penunjukkan Kawasan Agribisnis Kakao di Kabupaten Berau.

Dimensi Sumberdaya

Implementasi kebijakan pada Dinas Perkebunan akan berhasil apabila didukung oleh pihak-pihak terkait stakeholders baik pemerintah, sector swasta bahkan masyarakat atau yang tergabung dalam kelompok tani pekebun kakao. Salah satu dukungan Pemerintah Kabupaten Berau dalam implementasi kebijakan dalam penelitian ini berupa kegiatan yang mendukung pengembangan agribisnis kakao dan masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pada SKPD Dinas Perkebunan selama lima (5) tahun terakhir antara lain sebagai berikut sebagai berikut :

Program kegiatan tersebut tidak hanya focus pada satu komoditi tapi untuk 5 komoditi unggulan termasuk kakao didalamnya. Menurut Kepala Bidang Perlindungan Dinas Perkebunan Kabupaten

Berau, Ir. H Heri Suparno, M.Si, "Dinas Perkebunan memiliki program dan kegiatan yang mendukung pengembangan kawasan agribisnis kakao di Kabupaten Berau sejak Tahun 2002 hingga sekarang yaitu Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu dimana kegiatan ini lebih fokus dalam upaya pengendalian hama dan penyakit pada tanaman".

Melalui SLPHT diharapkan dapat membantu para petani/pekebun kakao dalam mengelola kebunnya sehingga dapat meningkatkan hasil produksi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga petani kakao.

Menurut Ir Sumaryono Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, selain Dinas Perkebunan pihak-pihak terkait dalam pengembangan agribisnis kakao di Kabupaten Berau ada juga NGO dan pihak swasta lainnya, hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, bahwa ada beberapa NGO antara lain GIZ, Solidaridad, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) bersama dengan Yayasan Kalimajari, Forclime serta pihak swasta yaitu PT. Berau Coal.

Salah satu program yang telah memberikan nilai (value) bagi pengembangan kakao di Kabupaten Berau adalah dukungan dari YKAN bersama dengan Yayasan Kalimajari Bali untuk mendorong tumbuh dan semakin kuatnya perbaikan kualitas kakao melalui proses fermentasi.

Kolaborasi ini dibangun dengan Pipiltin Jakarta, salah satu perusahaan coklat terkemuka di Indonesia, dengan menyampaikan kepada public satu karya Single Origin Coklat Kampung Merasa - Berau. Single Origin adalah sebuah perkembangan dunia percoklatan, karena menempatkan sumber biji (wilayah) dalam kemasan (Yunindanova, Dimas, dan Sigit, 2021). Hal ini memberikan dampak yang positif terhadap motivasi dan kebanggaan petani dalam menjaga kualitas biji kakao yang dapat dihasilkan melalui fermentasi. Single Origin Kampung Merasa 71% adalah sebuah hasil karya kolaboratif dari berbagai pihak, untuk menunjukkan kualitas biji kakao di Kabupaten Berau mampu disejajarkan dengan wilayah lain di Indonesia.

Program lain yang telah berjalan mulai dari tahun 2020 di 6 kampung dari dua Kecamatan, kolaborasi antara YKAN dan Kalimajari adalah program penguatan petani kakao serta kelembagaan petani. Dukungan lain dari dimensi sumberdaya ini adalah dari FPB Kabupaten Berau sebagaimana yang disampaikan Ketua FPB Berau, Ir, H Haris Sabran sebagai berikut: "secara umum terdapat program untuk pengembangan perkebunan berkelanjutan seperti pelatihan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditi perkebunan (sawit dan non sawit, contoh kakao). Saat ini yang dilakukan Forum KPB Berau belum ada rancangan program khusus secara terencana dan terfokus untuk komoditi kakao. Tapi sepengetahuan kami, Dinas Perkebunan Berau telah mendorong rencana-rencana perkebunan dalam pengembangan komoditi kakao di kabupaten Berau sehingga forum mengambil peran mendukung upaya tersebut sebagai mitra pembangunan perkebunan berkelanjutan". Salah satu bentuk dukungan yang diberikan, yaitu :

- a. Mendorong dan memfasilitasi Dinas Perkebunan Berau untuk memperoleh Sertifikasi IG
- b. Memfasilitasi kunjungan-kunjungan kabupaten lain dan pelatihan budidaya dan pasca panen kakao

Salah satu metode yang dipergunakan untuk mengetahui berbagai program dan kegiatan yang telah berjalan secara hulu ke hilir adalah *story line*. Informasi yang bersumber dari para peserta workshop, dituliskan, dikumpulkan dan kemudian dibuatkan analisa. Hal ini dipergunakan untuk memudahkan dalam mencari informasi apakah masih terjadi kesenjangan program (*lack atau gap*) dan nilai (*value*) yang hilang dan apa yang dapat dilakukan untuk mengisi dari setiap kesenjangan tersebut bila ada.

Hal yang lain adalah program dan kegiatan apa saja yang sudah dijalankan selama ini, oleh semua stakeholder mulai dari SKPD, pihak swasta, perbankan dan lainnya yang ada relasinya paling kuat dengan pengembangan program kegiatan pengembangan kakao di Kabupaten Berau. Hasil pemetaan dalam workshop menunjukkan bahwa implementasi program

pengembangan agribisnis kakao adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Implementor Program Pengembangan Agribisnis Kakao

Lembaga/Aktor	Peran Pihak
Bupati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbit Surat Keputusan (SK) Bupati No. 530 Tahun 2018 Tentang penunjukan kawasan pengembangan agribisnis kakao di Berau
Baplitbang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen RPJMD dan Renstra
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi pihak terkait termasuk swasta dan NGO dan lainnya
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asistensi anggaran APBD
Forum komunikasi Perkebunan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitator pihak-pihak terkait dalam pengembangan komoditi kakao
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendukung Dinas Perkebunan dalam penetapan ANKT/HCV
Kepala Kampung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Keputusan ICS/Kelompok Tani
Merasa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan kemudahan usaha (ADK)
Pemerintahan Kampung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyedia legalitas (SK/PERKAM) ▪ Penasihat/PJ ▪ Penyedia unit usaha (BUMK)
KPH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong program PS (HD, Kemitraan kehutanan, HKM, HTR, Hutan Adat)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses kegiatan Perhutanan Sosial pada kawasan
Disbun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SK pokja gemari no. 571 tahun 2017
ICS/Kelompok Tani	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat SK
DPMK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dengan adanya peraturan pemerintah RI No.11 Tahun 2021 Tentang BUMK pada pasal 8 bahwa BUMK memperoleh status Badan Hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

YKAN	▪ Kemitraan <i>building</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi terbentuknya kelompok tani ▪ Pembinaan budidaya pemeliharaan dan pasca panen

Tabel 2 diatas menunjukkan berbagai program yang telah dilaksanakan berbagai pihak termasuk komunitas di tingkat Kelompok Tani (ICS) dan Lembaga NGO Internasional dan lembaga pendamping lainnya. Kolaborasi antara Dinas Perkebunan, Baplitbang (fungsi sebagai kordinator dan fasilitasi), Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan menunjukkan kolaborasi kebijakan yang saling menguatkan dan didukung oleh intervensi program di tingkat Kelompok Tani.

Saat diskusi berlangsung ditemukan kesenjangan program terutama dari sisi penguatan kelembagaan komunitas petani terkait kebijakan dengan penguatan permodalan untuk membangun upaya pemasaran yang lebih berkelanjutan. Sehingga masih ada ruang yang harus ditingkatkan dalam bentuk Kerjasama antar pihak antara lain penguatan kapasitas, kolaborasi program dan kegiatan karena terdapat banyak program ke depan seyogyanya bisa dipadukan antara program teknis dengan penguatan kapasitas, melalui pelatihan.

Bantuan tidak hanya bibit-bibit, namun berbagai pelatihan kampung mandiri benih untuk mampu memenuhi bibit yang berkualitas. 3 poin penting program yang penting untuk diperkuat adalah :

- akses permodalan
- pendampingan pasca panen
- penguatan kapasitas

Hasil kompilasi dan analisa dari proses tersebut diatas, juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan petani, ketua ICS (Internal Control System) dan juga Kepala Kampung Merasa. Kekuatan utama para pembudidaya dalam menjaga kebun, menjalankan PsPSP (Panen sering, pemupukan, sanitasi dan pemangkasan) dengan baik termasuk di dalamnya adalah proses fermentasi. Beberapa kampung secara swadaya telah membangun sentra pembibitan untuk memenuhi kebutuhan para pembudidaya dan melakukan

pemilihan terhadap beberapa klon/jenis bibit yang unggul dan mampu beradaptasi dengan iklim setempat.

Demikian juga dengan tim ICS/Kelompok Tani yang sudah membangun kesadaran pembudidaya untuk melakukan proses penjualan secara bersama-sama melalui mekanisme penjualan biji basah dan kering ke para pembeli (*chocolate maker*).

Wawancara juga dilakukan dengan Kepala Kampung Merasa berkaitan dengan dukungan program kampung maupun Dana Desa untuk dukungan program kakao. Tahun ini dianggarkan dana kampung untuk pemberdayaan masyarakat dan pilihannya adalah penyediaan bibit yang berkualitas kepada masyarakat pembudidaya kakao.

SIMPULAN

Empat dimensi implementasi kebijakan pada penelitian ini, dimensi sumberdaya berperan sangat penting dan menentukan dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agribisnis Kakao Di Kabupaten Berau Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.

Hal ini karena adanya stakeholder baik dari pemerintah, masyarakat (kelompok tani), sector swasta dan NGO yang semuanya merupakan potensi sumberdaya dalam mendukung implementasi tersebut, maka diperlukan kepemimpinan yang mempunyai kekuatan leadership dan management dalam mengelola potensi sumberdaya yang ada untuk dikolaborasikan dalam rencana aksi untuk mencapai tujuan organisasi. Dan ini telah dilakukan oleh kepala dinas perkebunan kabupaten berau, sekaligus ini menjadi novelty value dalam penelitian ini yakni leadership yang kuat, manajerial dalam kolaborasi pihak terkait dari seorang pemimpin. Faktor penghambat dari Implementasi ini adalah dipengaruhi kondisi alam karena kelembaban yang tinggi, alih fungsi lahan dengan komoditas lainnya, dan kurangnya kapasitas petani terkait manajemen kakao serta dampak pandemi covid19 pada awal 2020 sampai hari ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, R. (2006). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rienika Cipta.

- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman (2017). *Peran Penyuluh Pertanian Dalam Peningkatan Produksi Padi Sawah di Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau*. Jakarta: Tugas Akhir Program Magister, Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
- Chansa Arfah SY (2019). *Strategi Pengembangan Agribisnis Kakao Di Sulawesi Tengah*. *Journal J. Agroland Vol 26 (2) : 179 – 188*
- Saleh Abdul R (2016). *Agroforestri Dan Pengelolaan Kebun Kakao Berkelanjutan*. *Jurnal Agropet. Vol 13 No,1*
- Tim Pokja Gemari Kakao (2018). *Inovasi gerakan mengembangkan agribisnis kakao atau yang disingkat dengan GEMARI KAKAO: Berau, Dinas Perkebunan*
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 314/KPTS/KB.020/10/2015 Tahun 2015 *Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao (Theobroma cacao L.)*
- Bupati Berau (2016) *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2016-2021*. Pemkab Berau
- Bupati Berau (2016) *Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah*. Pemkab Berau
- Bupati Berau (2016) *Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Perubahannya*. Pemkab Berau
- Bupati Berau (2018) *SK Bupati Nomor 530 Tentang Penunjukan Kawasan Pengembangan Agribisnis Kakao*. Pemkab Berau
- Dinas Perkebunan (2016) *Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Berau 2016-2021*. Disbun Berau
- Kepala Dinas Perkebunan (2018) *Surat Dinas Nomor : 525/351/Sekretariat, pada tanggal 21 Mei 2018 perihal Laporan hasil Penelusuran Rencana kawasan kakao dan lada di Kabupaten Berau*.
- Agustino, Leo. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi-2)*. Bandung: Alfabeta.
- Hesti Dewi Masitah, Made Narka Tenaya dan Dwi Putra Darmawan(2016) *Strategi Pemberdayaan Koperasi Tani Berbasis Agribisnis di Kabupaten Badung*. *Jurnal Manajemen Agribisnis. Vol. 4, No. 2, Oktober 2016*
- Kohls dan Uhl. 2002. *Marketing of Agricultural Products*. Ninth Edition. Prentice Hall, New Jersey.
- Adeniyi, O. R., & Ogunsola, G. O. (2014). *Cocoa Production and Related Social-Economic and Climate Factors: A Case Study of Ayedire Local Government Area of Osun State, Nigeria*. *Agricultural Science, 2(4), 1–13*. <https://doi.org/10.12735/as.v2i4p01>
- Aryal, J. P., Sapkota, T. B., Khurana, R., Khatri-Chhetri, A., Rahut, D. B., & Jat, M. L. (2020). *Climate change and agriculture in South Asia: adaptation options in smallholder production systems*. In *Environment, Development and Sustainability (Vol. 22, Issue 6)*. Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s10668-019-00414-4>
- Denkyirah, E. K., Okoffo, E. D., Adu, D. T., & Bosompem, O. A. (2017). *What are the drivers of cocoa farmers' choice of climate change adaptation strategies in Ghana? Cogent Food and Agriculture, 3(1)*. <https://doi.org/10.1080/23311932.2017.1334296>
- Halaliah, R., Rudi. W., Agus. S. (2019). *Strategi Peningkatan Produksi Mutu Biji Kakao Mulia di PTPN XII Kebun Benteng Kabupaten Jember*. *Berkala Ilmiah Pertanian, 2(2), 66-71*.
- Iksan, A., Djefry D., Nasrun S. (2018). *Strategi Adaptasi Petani Kelapa Di Desa Lelilef Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah*. *Jurnal Holistik*.
- Koissy, Yao V. A, N'Zue, Felix F. (2020). *Climate change and cocoa production in cote d'ivoire: Should we worry? Journal Of Economics and Business*.
- Saputro, W. A dan Yuli. F. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Kakao Desa Nglangga Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul*. *Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika, 5(1), 24-30*.
- Sinaga, A., & Kusumaningrum, M.Y. (2020). *Peningkatan Produksi Kakao Melalui Pemeliharaan Tanaman Secara Berkelanjutan*. *Jurnal Agrisistem, 16(2)*.
- Yunindanova, M. B., Dimas, R. A. M., Sigit, P. (2021). *Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Biji Kakao Melalui Intensifikasi Perawatan Kakao, Introduksi Alat Budidaya, dan Pengereng Sistem Hybrid*. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat, 3(1):8-15*.